

**GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
DESTINASI WISATA DI DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**

**GOOD TOURISM GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST  
DESTINATIONS IN BIRA VILLAGE BULUKUMBA REGENCY**



**MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI**

**E012222014**



**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
DESTINASI WISATA DI DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**

**MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI**

**E012222014**



**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**GOOD TOURISM GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST  
DESTINATIONS IN BIRA VILLAGE BULUKUMBA REGENCY**

**MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI**

**E012222014**



**MASTER PUBLIC ADMINISTRATION  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
INDONESIA  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI  
WISATA DI DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI  
E012222014**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal  
**4 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Menyetujui  
Pembimbing Tugas Akhir

  
**Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si.**  
Nip. 196212311989031028

Ketua Program Studi  
Administasi Publik



**Dr. Gita Susanti, M.Si.**  
Nip. 196503111991032001



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
Nip. 197608182008041008

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI  
NIM : E012222014  
Jurusan/Program Studi : Magister Admnsitrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan Judul : "**GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Desember 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fadillah Velayati

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul : **GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**. Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat, Good Tourism Governance, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.. Adapun ucapan terimakasih tidak lupa saya sampaikan kepada :

1. Dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si.
2. Dosen penguji 1 Bapak Prof. Dr. Muh Akmal Ibrahim, M.Si.
3. Dosen penguji 2 Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si.
4. Keluarga dan saudara saya
5. Teman angkatan dan yang terlibat dalam pembuatan tesis ini.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, 4 Desember 2024

Penulis

Muhammad Fadillah Velayati

## ABSTRAK

MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI. *Good Tourism Governance Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Bira Kabupaten Bulukumba*. (dibimbing oleh Badu Ahmad).

Implementasi pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bira masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, serta kebutuhan akan strategi tata kelola yang lebih efektif dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tata kelola strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di destinasi Desa Bira. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian Fenomenologi *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah kebenaran data dari manusia itu sendiri. Untuk mengecek kebenaran data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pengembangan destinasi wisata tentunya akan membawa kemungkinan terjadinya dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut tergantung pada manajemen dan tata kelola kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, industri, masyarakat yang ada di destinasi. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan, hanya akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui prinsip tatakelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*).

**Kata Kunci:** Desa, Wisata, Good Tourism Governance, Pengembangan, Masyarakat.

## ABSTRACT

MUHAMMAD FADILLAH VELAYATI. *Good Tourism Governance In The Development Of Tourism Destinations In Bira Village Bulukumba Regency (supervised by Badu Ahmad).*

*The implementation of community-based tourism in Bira Village still faces various challenges, including a lack of coordination between government, the private sector and local communities, as well as the need for more effective and inclusive governance strategies. Therefore, this research aims to conduct a strategic governance analysis in the development of community-based tourism in the Bira Village destination. This research uses a qualitative research approach, with the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) type of research. In qualitative research, the main instrument is humans, therefore what is checked is the truth of the data from the humans themselves. To check the correctness of the data in this research, the researcher used triangulation techniques. The development of tourist destinations will certainly bring the possibility of positive and negative impacts. This impact depends on tourism management and governance played by all stakeholders, including government, industry and the community at the destination. Achieving the goals and missions of tourism development will only be possible if the process of achieving them can be carried out through the principles of good tourism governance..*

**Keywords:** *Village, Tourism, Good Tourism Governance, Development, Community.*

## DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Penelitian Terdahulu .....	8
1.6 Konsep <i>Governance</i> .....	10
1.7 Konsep Pengembangan Pariwisata .....	13
1.8 Teori <i>Tourism Governance</i> .....	17
1.9 Pariwisata Berbasis Masyarakat .....	19
1.10 Potensi Pariwisata.....	23
1.11 <i>Good Tourism Governance</i> .....	24
1.12 Kerangka Pikir.....	28
BAB II METODE PENELITIAN .....	30
2.1 Pendekatan Penelitian .....	30
2.2 Lokasi Penelitian .....	30
2.3 Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
2.4 Sumber Data .....	32
2.5 Informan Penelitian .....	33
2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
2.7 Teknik Pengabsahan Data.....	34
2.8 Teknik Analisis Data.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
3.1 Hasil Penelitian .....	39
3.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian .....	39
3.1.2 Data Pengunjung Desa Wisata Bira .....	42
3.2 Pembahasan .....	43
3.2.1 Peran Pemerintah Daerah .....	43
3.2.2 Partisipasi Masyarakat Setempat .....	49

3.2.3	Keterlibatan <i>Stakeholder</i> Terkait dan Dampaknya .....	53
3.2.4	Kemitraan Kepemilikan Lokal .....	64
3.2.5	Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut .....	69
3.2.6	Akomodasi Aspirasi Masyarakat .....	71
3.2.7	Daya Dukung Lingkungan .....	74
3.2.8	Monitor dan Evaluasi Program .....	77
3.2.9	Akuntabilitas Lingkungan.....	80
3.2.10	Pelatihan Pada Masyarakat.....	82
3.2.11	Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan.....	83
BAB IV PENUTUP .....		87
4.1	Kesimpulan.....	87
4.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....		89
LAMPIRAN.....		97
DOKUMENTASI PENELITIAN.....		106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pariwisata masih menjadi komoditi andalan bagi Indonesia. Sektor ini memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Selain itu, pariwisata memiliki posisi strategis dalam mengurangi jumlah pengangguran serta dapat meningkatkan devisa negara. Hal ini mengingat bahwa pariwisata mencakup berbagai bentuk entitas usaha yang saling bersinergi satu sama lain, seperti jasa perjalanan (travel), rumah makan, hingga penginapan. Indonesia sendiri memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dari Sabang hingga Merauke, baik wisata nasional maupun lokal dengan berbagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada. Adanya sektor wisata diharapkan mampu menghasilkan devisa lebih banyak lagi melalui kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata Indonesia yang kaya mulai menjadi tumpuan harapan bagi penerimaan devisa negara selain sektor vital lainnya seperti minyak bumi dan gas (Nurmansyah, 2014).

Secara nasional, pada kuartal pertama tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah aktivitas wisatawan domestik sebesar 433,57 juta perjalanan atau naik sekitar 12,57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, dari segi jumlah kunjungan wisatawan asing ialah sebanyak 6,31 juta kedatangan yang setara dengan kenaikan 196,85% dari tahun 2022 (Kemenparekraf.go.id, 2023). Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada bulan April 2024 saja jumlah kunjungan wisatawan asing mampu menembus angka 1,07 juta orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 2,41 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya di

tahun yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan sehingga penting untuk selalu dikembangkan.

Permasalahan muncul manakala dalam pengembangan wisata masih mengalami hambatan, khususnya di tingkat daerah. Berbeda dengan wisata nasional yang biasanya banyak dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh penjuru negeri bahkan mancanegara dengan perkembangannya yang lebih cepat, sektor wisata lokal relatif lebih lambat sebab kunjungan yang hanya terbatas pada penduduk setempat maupun wisatawan daerah. Karenanya wisata lokal akan sulit berkembang terutama jika tidak didukung dengan partisipasi dari berbagai pihak terkait. Terdapat beberapa faktor yang turut menyebabkan sektor wisata menjadi kurang berkembang, mulai dari masalah tumpang tindihnya peraturan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten, belum optimalnya infrastruktur yang mendukung, belum adanya investasi, hingga kurangnya kepedulian terhadap aspek lingkungan hidup (Sumarjiyanto, 2020).

Sementara itu, Kementerian Pariwisata menyebutkan beberapa kendala dalam pengembangan wisata di Indonesia, di antaranya yaitu kurangnya pengemasan daya tarik wisata, adanya disparitas dalam pembangunan kawasan wisata, minimnya diversifikasi produk, keterbatasan SDM, serta sering adanya gesekan atau konflik sosial dengan kondisi politik yang tidak kondusif (Asmara, 2020). Adanya hambatan dalam pengembangan wisata di tingkat daerah semacam ini perlu diatasi oleh pihak terkait, supaya dapat menghasilkan manfaat yang optimal terutama bagi masyarakat sekitar. Diperlukan keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta (investor) dan masyarakat untuk saling membangun wisata di daerah kurang berkembang (Lestari, 2024).

Pengembangan pariwisata daerah atau wisata lokal penting sebab ini dapat mendorong pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk industri kreatif, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya tingkat kunjungan yang intens ke wisata lokal, maka para pelaku usaha setempat dapat menjual produk dan jasanya untuk memperoleh pendapatan. Tidak hanya itu, pengembangan wisata lokal juga dapat memberikan manfaat bagi daerah, yakni melalui ketersediaan lapangan kerja baru di sektor formal maupun informal dan dapat melestarikan tradisi budaya setempat (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Apabila potensi wisata lokal mampu dikembangkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Destinasi wisata yang tadinya hanya berskala lokal dapat menjadi skala nasional. Terlebih masih banyak potensi wisata daerah di Indonesia yang masih belum diketahui oleh dunia.

Pengembangan wisata lokal pada dasarnya diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan tanggungjawab mengatur tata kelola sektor pariwisatanya. Instrumen peraturan perundang-undangan ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah guna mengembangkan kekayaan destinasi wisata yang dimiliki. Mengingat bahwa sektor pariwisata lokal memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional maka akan dibutuhkan sistem tata kelola wisata yang baik (*Good Tourism Governance*).

Konsep penyelenggaraan tata kelola wisata yang baik (*Good Tourism Governance*) akan dibutuhkan dalam pengembangan wisata lokal supaya lebih maju ke depannya. *Good Tourism Governance* mengacu pada mekanisme upaya untuk mengembangkan strategi dan kebijakan bisnis yang dapat menggabungkan semua

pihak, baik individu dan organisasi di destinasi wisata. Penerapan *Good Tourism Governance* juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Novrian dan Adlin, 2022). *Good Tourism Governance* mencakup prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan evaluasi. Dengan kualitas layanan yang diberikan secara optimal maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan sehingga mendorong mereka berkunjung kembali (Fadilla, 2024). Namun, sayangnya fenomena yang terjadi di lapangan ialah bahwa pengelolaan wisata lokal masih belum sepenuhnya sesuai harapan seperti yang terjadi di Desa Bira Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Fenomena belum optimalnya pengelolaan kepariwisata di Desa Bira yang memiliki potensi kekayaan alam, budaya, dan sejarah menjadi masalah penting untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa desa ini memiliki obyek daya tarik wisata yang melimpah namun belum tergarap secara maksimal dan terintegrasi dalam upaya mempromosikan destinasi Bulukumba secara lebih luas. Desa Bira memiliki 12 destinasi wisata bahari yang tersebar di pesisir pantai kabupaten bulukumba dari 12 destinasi ini terdapat 5 destinasi yang telah dikelola oleh pemerintah dan 7 destinasi yang masih dikelola oleh masyarakat setempat secara swadaya. Sedangkan masalah yang masih dialami desa wisata ini antara lain yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, serta kebutuhan akan strategi tata kelola yang lebih efektif dan inklusif sehingga akan memicu perkembangan wisata yang terhambat.

Desa Bira seharusnya dapat menjadi salah satu primadona wisata daerah Sulawesi Selatan bahkan dapat naik ke skala nasional dengan kunjungan wisatawan dari berbagai penjuru nusantara hingga mancanegara. Dengan beberapa destinasi wisata bahari favoritnya seperti Tanjung Bira, Pulau Laikang serta Pantai Appalarang

Desa Bira sangat potensial dalam mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak sebagai wujud implementasi konsep *Good Tourism Governance*.

Sementara itu, masih terdapat perdebatan ilmiah antar studi terdahulu dalam memandang efektivitas penerapan konsep *Good Tourism Governance* guna mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Indonesia. Meskipun beberapa studi terdahulu menyatakan sepakat bahwa *Good Tourism Governance* diperlukan dalam pembangunan pariwisata, namun belum ada konsensus bersama bahwa pengembangan wisata daerah dapat dicapai secara optimal dengan konsep ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novrian dan Adlin (2022) menemukan bahwa *Good Tourism Governance* tidak dapat diterapkan secara maksimal pada salah satu objek wisata di daerah Kepulauan Riau. Beberapa penyebab di antaranya karena ada syarat-syarat indikator yang belum terpenuhi, termasuk adanya faktor penghambat dalam penerapan *Good Tourism Governance* yaitu masalah SDM, anggaran, status kepemilikan lahan wisata dan situasi pandemi.

Selanjutnya hasil penelitian Utamy, et al. (2023) menunjukkan bahwa *Good Tourism Governance* mampu membawa perubahan yang baik dalam pengelolaan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Berau meskipun ada 5 dari 10 indikator yang berjalan kurang optimal, yaitu kualitas SDM, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dengan swasta, infrastruktur wisata yang kurang memadai, minimnya akuntabilitas serta kurangnya promosi. Sedangkan penelitian Nugraha, et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi *Good Tourism Governance* dapat berjalan efektif apabila tujuan kebijakan wisata mudah dipahami arahnya oleh pihak pelaksana di lapangan dan seluruh elemen mampu bersinergi dengan baik dalam pembangunan wisata tersebut.

Berdasarkan hasil studi terdahulu di atas dapat diketahui bahwa belum adanya kesepakatan tunggal terkait bagaimana peran *Good Tourism Governance* dapat mendukung pengembangan wisata daerah dan apakah itu berlaku di setiap wisata lokal ataukah tidak. Masih terdapat perbedaan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan wisata berbasis *Good Tourism Governance*. Perbedaan ini disinyalir menjadi sebab adanya kesenjangan penelitian yang perlu untuk diisi.

Oleh karenanya tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan konsep *Good Tourism Governance* dalam mendukung pengembangan wisata lokal di Desa Bira Kabupaten Bulukumba beserta terjalannya keterlibatan pihak terkait di dalamnya guna mencapai hal tersebut. Sebagai kebaruan riset, penulis menambahkan pendekatan fenomenologi *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) dalam metode kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penulis mengangkat judul "*Good Tourism Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Desa Bira Kabupaten Bulukumba" dalam penyusunan Tesis ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan konsep *Good Tourism Governance* dalam mendukung pengembangan wisata lokal di Desa Bira Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana keterlibatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya dalam mencapai pengembangan destinasi wisata lokal di Desa Bira Kabupaten Bulukumba?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *Good Tourism Governance* dalam mendukung pengembangan wisata lokal di Desa Bira Kabupaten Bulukumba?
2. Untuk mengetahui keterlibatan peran Pemerintah Daerah, investor, dan masyarakat setempat dalam mencapai pengembangan destinasi wisata lokal di Desa Bira Kabupaten Bulukumba?

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademis tentang pengembangan pariwisata daerah berbasis *Good Tourism Governance*.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori dan model konseptual yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan pariwisata dan tata kelola strategis di berbagai destinasi wisata.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi pemerintah daerah, organisasi pariwisata, dan stakeholders terkait dalam mengambil keputusan terkait pengembangan pariwisata di Desa Bira.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bira, memberikan arahan tentang strategi yang efektif dan berkelanjutan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi pengembangan pariwisata yang lebih inklusif, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata, serta distribusi manfaat yang lebih merata.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, melalui implementasi strategi yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan di Desa Bira.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan berupa teori dari temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya menjadi hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Data tersebut sebagai bentuk hasil temuan dari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang peneliti gunakan:

1. Erlina Ayu Ningrum (2016)

Judul penelitiannya yakni “Studi Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014.” Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Kampung Bandar Desa Wisata di kota Pekanbaru karena belum cukup optimal, tinggi Permintaan terhadap pariwisata tidak sebanding dengan pelayanan yang

diberikan pemerintah akan menjadi kepuasan pariwisata. Metodenya yakni kualitatif jenis penelitian deskriptif yang pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata pemerintahan desa belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip yang baik penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Pada prinsipnya partisipasi masyarakat sudah cukup dalam pengelolaan desa wisata, namun pemerintah belum transparan terkait program pengembang desa wisata, responnya masih lemah, dan program Desa Wisata masih belum cukup efektif dan efisien.

2. Helmita., Oktavia, N. S., Niluh, T. J., & Julpan Dwinata (2021)

Judul penelitiannya yakni “Pengembangan Desa Wisata Berkonsep *Smart Tourism* Melalui Pemberdayaan Kompetensi Masyarakat Desa Pujorahayu.” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengembangan desa wisata berkonsep *smart tourism* melalui pemberdayaan masyarakat desa Pujorahayu, data diperoleh melalui melalui kajian literatur dari berbagai artikel jurnal, kuesioner, sebagai bahan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berkonsep *smart tourism* melalui pengembangan kompetensi masyarakat merupakan solusi bagi perkembangan sebuah desa. Selain itu, dengan adanya penerapan konsep *smart tourism* membuat sebuah pengalaman wisata yang baik, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan efektifitas, sehingga dapat mengarah pada keberlanjutan yang kompetitif.

3. Nurul, A. W., Dede, S. K., & Neneng, Y. Y (2021)

Judul penelitiannya yakni “Akselerasi Pengembangan Destinasi iwsata Danau Toba.” Penelitian ini dilatarbelakangi pariwisata Danau Toba yang belum dikelola maksimal, berdampak rendahnya minat kunjungan wisatawan, tumpang tindihnya pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait kepariwisataan, minimnya keterbukaan informasi, dan kurang melibatkan masyarakat adat berimplikasi maraknya konflik pembebasan lahan masyarakat. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana BPODT melakukan pengembangan destinasi wisata Danau Toba berdasarkan prinsip good governance yang dikemukakan Sedarmayanti (2007) berdaar aspek transparansi, akutabilitas, dan partisipasi. Penelitian bersifat kualitatif, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, analisis data dan validasi menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan pengembangan objek wisata Danau Toba oleh BPODT masih belum optimal, terlihat kurangnya keterbukaan, informasi, dan koordinasi. Berdasarkan aspek akuntabilitas BPODT berupaya maksimal membuat kawasan objek wisata Danau Toba menjadi kawasan pariwisata kelas dunia yang unggul dan didukung infrastuktur yang memadai. Serta menerapkan kebijakan pemeliharaan ekosistem melalui pencegahan dan penanggulangan kawasan objek wisata Danau Toba. Terkait partisipasi BPODT dan stakeholder saat ini sudah berjalan, meskipun masih terjadi konflik pembebasan lahan

### **1.6 Konsep Governance**

Istilah “*Governance*” berasal dari kata “*government*”, yang merujuk pada organisasi atau lembaga yang mengatur kekuasaan dalam suatu negara. Konsep government lebih menekankan pada peran tunggal lembaga pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Seiring perkembangan, konsep *governance* muncul sebagai pengganti konsep *government* dalam pemahaman dan praktik pemerintahan. *Governance* berasal dari akar kata "govern", yang mencakup semua proses, aturan, dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat.

Dalam pemahaman yang lebih luas, *governance* melibatkan semua lembaga dan unsur masyarakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah. Pergeseran makna dari *government* ke *governance* mencerminkan peningkatan peran serta masyarakat dan perluasan ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Leach dan Percy Smith menggambarkan perbedaan antara *government* dan *governance* di antaranya bahwa istilah *government* menyoroti peran politisi dan lembaga pemerintah dalam inisiasi pelayanan, sementara *governance* memperluas peran masyarakat dan unsur non-pemerintah dalam proses tersebut.

Dengan demikian, *governance* menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana partisipasi masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak menjadi lebih penting. Berbeda dengan *government* yang menekankan pada lembaga pemerintahan sebagai inisiator utama pelayanan kepada masyarakat, *governance* memperluas peran tersebut untuk melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat dan non-pemerintah.

*Governance* adalah model pemerintahan yang sangat dinamis yang melibatkan partisipasi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang hanya didominasi oleh pemerintah (*government*) menjadi inklusif terhadap peran aktif sektor lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teguh Kurniawan menjelaskan bahwa *governance* adalah proses kebijakan yang membuka ruang untuk keterlibatan sektor

lain dalam pemerintahan, mengurangi otoritas tunggal pemerintah, dan memperluas partisipasi masyarakat.

Dalam kondisi di mana pemerintah menghadapi keterbatasan dalam penanganan masalah publik karena sumber daya dan finansial yang terbatas, kolaborasi dengan sektor lain menjadi penting. Rosidi dan Fajriani mengidentifikasi tiga aktor utama dalam proses *governance*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, melainkan membutuhkan kontribusi dari sektor lain. Peran swasta sangat penting dalam menyokong pemerintah dengan sumber daya finansialnya, namun haruslah dijalankan dengan tanggung jawab sosial dan bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat juga krusial, dengan memberikan mereka ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemerintahan, tetapi juga mendorong mandiri masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Tata kelola yang baik terdiri dari berbagai komponen utama yang saling berinteraksi dan membentuk sebuah kesatuan yang kompleks. Menurut Farazmand (2021), komponen utama tersebut meliputi proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Semua komponen ini berperan dalam membangun inklusifitas relasi politik antara negara/pemerintah, *civil society*, dan sektor bisnis.

Tata kelola yang baik juga melibatkan proses yang dinamis dan kompleks, yang memiliki variasi, kompleksitas, dan intensitas internal, serta dihadapkan pada tantangan eksternal, hambatan, dan peluang. Inovasi menjadi kunci dalam tata kelola

yang baik, baik dalam kebijakan maupun administrasi, karena inovasi berkontribusi pada peningkatan kapasitas, inovasi, kreativitas, dan respon adaptif.

Namun, praktek administrasi publik tradisional semakin sulit terlaksana karena perubahan konsep yang dilakukan secara ilmiah dan penilaian teknologi, serta pengaruh globalisasi ekonomi yang menyulitkan pembangunan sosial ekonomi-politik. Isu-isu tata kelola pemerintahan, terutama di negara berkembang, menjadi isu global yang menuntut kerjasama internasional, terutama dalam mengatasi masalah seperti korupsi.

Tata kelola pemerintahan pada tingkat lokal, seperti pemerintah daerah, menuntut partisipasi aktif dari masyarakat melalui kemitraan dan peningkatan kapasitas. Reformasi kontemporer dalam sistem tata kelola dan manajemen melibatkan pembangunan kemitraan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai fitur kunci. Ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

### **1.7 Konsep Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan adalah strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan mengalami peningkatan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya (Yatmaja, 2019). Menurut (Darmayanti & Oka, 2020) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut. Menurut (Hasanah et al., 2021), menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata itu terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, yaitu:

1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan segala kegiatan pariwisata

2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan pariwisata.
3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.

Menurut (Noor & Pratiwi, 2016) dalam pengembangan sebuah pariwisata itu terdapat 4 prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Keberlangsungan ekologi artinya suatu pengembangan dalam pariwisata dapat menjamin pemeliharaan terhadap wisata tersebut.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya artinya dengan adanya pengembangan pariwisata membuat peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan dan budaya sehari-hari.
3. Keberlangsungan ekonomi artinya suatu pengembangan pariwisata yang menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat artinya memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

Pengembangan suatu pariwisata sangat diperlukannya sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya sebuah pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut (Sulistiyadi et al., 2017):

#### 1. Strategi Pengembangan Pariwisata

Strategi pengembangan pariwisata adalah hal yang dilakukan agar wisata yang ada menjadi berkembang lebih baik lagi kedepannya. Ketersediaan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan menunjang perkembangan pariwisata. Menurut Suwanto (2004), untuk strategi dalam pengembangan pariwisata terdiri dari :

- a. Pemasaran/Promosi adalah hal yang dilakukan guna untuk memperkenalkan, memberitahu masyarakat banyak mengenai objek wisata pada suatu daerah tersebut.
- b. Aksesibilitas adalah keadaan jalan yang akan dilalui oleh para pengunjung saat menuju tempat wisata . Ketersedian akses jalan yang baik dan lancar akan membuat banyak para wisatawan tertarik untuk berkunjung.
- c. Kawasan pariwisata adalah suatu tempat wisata yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini berguna untuk sebagai penunjang tempat wisata tersebut.
- d. Jenis objek wisata adalah jenis-jenis wisata yang ada di daerah tersebut, contohnya: pegunungan, pantai, budaya, maupun religi.
- e. Produk dari wisata adalah segala hal yang ditawarkan dari wisata tersebut. Baik dari segi fasilitas yang disediakan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- f. Sumber daya manusia adalah subjek yang sangat penting dalam melakukan pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk pengembangan pariwisata disebut kelompok sadar wisata.
- g. Kampanye nasional sadar wisata adalah suatu hal yang dilakukan dan dijalankan dengan tujuan untuk memberikan penegasan disiplin terkait kegiatan kepariwisataan, dan setiap pemerintah daerah biasanya telah membentuk suatu kelompok sadar wisata yang anggota kelompok adalah masyarakat sekitar tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hasil dari rapat Koordinator Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), menjelaskan bahwa ada 6 strategi pengembangan pariwisata yang bisa diterapkan, yaitu:

- a. Mempercepat penyelesaian infrastruktur.
- b. Mendorong pengembangan atraksi wisata.
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.
- d. Meningkatkan dan memperkuat promosi wisata.
- e. Mendorong masyarakat untuk bersedia berinvestasi.
- f. Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata.

## 2. Daya Tarik Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, daya tarik adalah “sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.” Pengembangan daya tarik wisata akan tergantung dengan kegiatan yang direncanakan untuk berkembang. Kegiatan yang akan dilakukan itu akan tergantung pada kondisi dan potensi di daerah, sistem pengelolaan di wisata daerah tersebut, sehingga untuk daya tarik wisata ini akan tergantung dari kondisi destinasi pariwisata tersebut.

### a. Jenis Daya Tarik Wisata

Menurut (Hasanah, 2017) daya tarik wisata dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Daya Tarik Wisata Alam Adalah sumber daya alam yang memiliki potensi dan daya tarik wisata. Potensi wisata alam dibagi dalam 4 kawasan yaitu: flora fauna, keunikan dan kekhasan ekosistem seperti

laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam pemandangan alam, air terjun, dan lainnya.

- 2) Daya Tarik Wisata Budaya Adalah suatu daya tarik wisata yang memperlihatkan ke kekhasan daerah suatu destinasi contohnya: tari-tari (tradisional), musik (tradisional), upacara adat, cagar budaya, museum, adat istiadat lokal, dan lainnya
- 3) Daya Tarik Wisata Buatan Adalah suatu daya tarik yang muncul dari hasil karya manusia yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, contohnya: saran dan fasilitas olahraga, hiburan (sulap, akrobat), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

### **1.8 Teori *Tourism Governance***

Definisi pariwisata (*tourism*) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ialah "kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara." Di mana ini biasanya didukung oleh bermacam-macam fasilitas beserta layanan penunjang yang disediakan oleh masyarakat sekitar bersana dengan swasta (pengusaha) maupun pemerintah setempat. *Tourism governance* atau tata kelola pariwisata, secara tradisional dipahami sebagai "aturan dan mekanisme untuk mengembangkan kebijakan dan strategi bisnis yang dapat menggabungkan semua organisasi dan individu" di destinasi wisata (Zhang & Zhu, 2014).

Menurut Siakwah, et al. (2020) *Tourism governance* identik dengan cara mengkoordinasikan sistem tata kelola kepariwisataan dalam suatu wilayah. *Tourism*

*governance* melibatkan peran spesifik dari pemerintah sebagai inisiator dan katalisator yang mengatur berjalannya proses koordinasi tata kelola wisata tersebut. Selain itu, pemerintah di sini juga berperan melakukan pembinaan kepariwisataan baik melalui peraturan (regulasi), pelatihan hingga pengawasan atas penyelenggaraannya itu (Siakwah et al., 2020).

*Tourism governance* setidaknya menganut beberapa prinsip, di antaranya yaitu legitimasi, akuntabilitas, transparansi, keadilan, integritas dan daya tahan. Indikator keberhasilan tata kelola wisata tergantung pada tiga hal yaitu “atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*). Adapun dalam praktiknya terdapat beberapa unsur yang menjadi fokus pengelolaan wisata yaitu sebagai berikut (Yunitasari, dkk, 2014):

1. Akomodasi, mengacu pada tempat menginap atau tempat tinggal yang digunakan oleh seorang wisatawan untuk sementara.
2. Restoran dan Jasa Boga, mengacu pada suatu entitas industri wisata di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang disajikan secara komersial.
3. Jasa angkutan (transportasi), mengacu pada moda bergerak/kendaraan yang digunakan untuk keperluan kegiatan wisata, meliputi darat, laut maupun udara dalam rangka mendukung usaha jasa wisata.
4. Atraksi Wisata, mengacu pada objek daya tarik wisata yang menjadi sasaran atau tujuan para wisatawan dalam kegiatan wisatanya.
5. Cinderamata (Souvenir), mengacu pada benda yang biasanya dijadikan oleh-oleh/buah tangan setelah para wisatawan mengunjungi suatu tempat wisata.
6. Biro Perjalanan (*Travel Agent*), mengacu pada suatu badan usaha yang menyediakan layanan perjalanan bagi para wisatawan ke berbagai tempat wisata, baik dari keberangkatan hingga kepulangannya.

## 1.9 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Menurut (Rusyidi & Fedryansah, 2018) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan power (daya) atau empowering dari golongan masyarakat yang powerless (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marginal. Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambar yang menggambarkan ilustrasi pemangku kepentingan dalam, pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2018).

Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (*resource*) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar

kepariwisataan dunia Pantiyasa (2011) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu “kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut.

Menurut Asy'ari et al. (2021) guna mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Sementara Salsabila et al. (2024) mengemukakan bahwa untuk mendukung pembangunan kepariwisataan maka diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, yang pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/ partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Rusyidi and Fedryansah (2018) mengemukakan bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu

strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat *community based tourism* ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

Murphy dalam Sunaryo (2013) menyebutkan bahwa pada hakekatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai “kegiatan yang berbasis pada komunitas”. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013) mengemukakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat atau "*community based tourism*" merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Lebih lanjut Sunaryo (2013) memandang bahwa pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, yaitu :

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Pariwisata berkelanjutan cenderung mengedepankan pendekatan top-down, namun pariwisata berbasis masyarakat akan mengedepankan pendekatan bottom-up sehingga akan saling sinergis (Asli D.A. Tasci, 2013). Menurut Beeton (2006) pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan pariwisata dengan

memberdayakan masyarakat setempat guna untuk menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan kearifan lokal sebuah tempat, dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat diharapkan lebih menguntungkan masyarakat dalam pembagian keuntungan dari usaha pariwisatanya. Pratt (2000) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dengan menyediakan produk yang mempertimbangkan kelestarian sosial dan lingkungan.

Tiga prinsip pokok dalam strategi pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat (CBT) menurut Sunaryo (2013), yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan pariwisata bagi masyarakat lokal, dan masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan. Aspek-aspek penting dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) diantaranya harus memperhatikan partisipasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan konservasi lingkungan (Yachya, 2016). Dari penjabaran teori pariwisata berbasis masyarakat tersebut didapatkan hasil sintesis komponen pariwisata berbasis masyarakat yang terdiri dari :

1. Pemberdayaan masyarakat lokal
2. Partisipasi masyarakat
3. Pelestarian aspek sosial (adat, budaya, kearifan lokal) dan lingkungan setempat
4. Bermanfaat bagi perekonomian masyarakat lokal.

### **1.10 Potensi Pariwisata**

Definisi tentang potensi wisata mengacu pada segala objek wisata yang memiliki peluang untuk dituju sebab dengan daya tariknya membuat para wisatawan mau untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Potensi wisata menjadi bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikelola dalam rangka

memperoleh manfaat bagi para pihak di dalamnya (Sukardi, 1998). Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Nawangsari (2018) yang dimaksud dengan potensi pariwisata yaitu: “berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek yang lainnya”.

Berdasarkan definisi tentang potensi pariwisata menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah wisata dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan dimiliki oleh tempat wisata itu sendiri. Dengan adanya potensi wisata yang dimiliki oleh setiap daerah, maka setiap orang akan tertarik berkunjung ke tempat tersebut. Potensi yang dapat dimanfaatkan itu berupa kesenian, kebudayaan baik nasional maupun daerah, keindahan alam, flora dan fauna maupun hal lainnya yang perlu dijaga kelestariannya.

### **1.11 Good Tourism Governance**

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah-swasta dan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan (*sustainable tourism*) dan berwawasan lingkungan hanya dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata kelola kepariwisataan yang baik (*Good Tourism Governance*). Sunaryo (2013) mengatakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan tatakelola kepariwisataan yang baik yaitu dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi

program antar stakeholder, serta dengan pelibatan partisipasi aktif yang bersinergi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terkait.

Selanjutnya Bambang Sunaryo menjelaskan bahwa secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai cirri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku

Kepentingan Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel, restoran, cinderamata, transportasi

wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang strategis.

#### 4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

#### 5. Mengakomodasikan Aspirasi

Masyarakat Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

#### 6. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

#### 7. Monitor dan Evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

#### 8. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

#### 9. Pelatihan Pada Masyarakat

Terkait Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan profesional.

#### 10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (sense of place) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan.

### 1.12 Kerangka Pikir

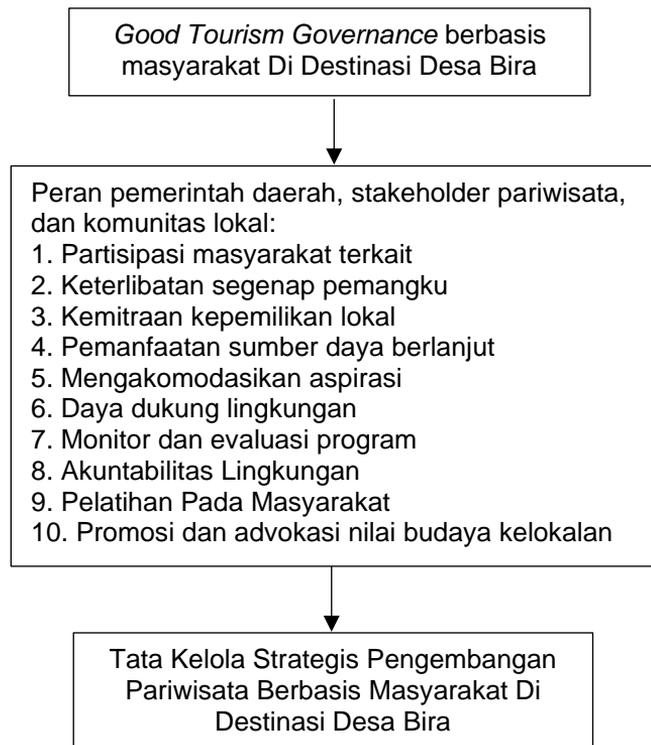
Berdasarkan tinjauan teoritis dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian maka penulis mengadopsi model kerangka pikir menurut (Mackay, 1998) dengan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

Pertama, analisis dimensi kondisi lingkungan eksternal. Lingkungan sosial di mana suatu kelembagaan beroperasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan kelembagaan. Faktor-faktor seperti kondisi politik, budaya, teknologi, ekonomi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan komponen penting yang perlu dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap kelembagaan.

Kedua, identifikasi motivasi kelembagaan. Kelembagaan memiliki motivasi internal yang mendasari eksistensinya. Aspek-aspek seperti sejarah, misi, budaya organisasi, dan sistem penghargaan yang diterapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelembagaan.

Ketiga, evaluasi kapasitas kelembagaan. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi strategi kepemimpinan, perencanaan program, manajemen pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan hubungan dengan pihak eksternal seperti klien, mitra, pembuat kebijakan pemerintah, dan donor eksternal.

Dengan memperhatikan dimensi-dimensi tersebut, dapat dipahami bagaimana sebuah kelembagaan beroperasi, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal, memotivasi anggotanya, serta memanfaatkan kapasitasnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian**

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni jenis metode penelitian yang dipakai untuk mengkaji fenomena secara alamiah. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2007) bahwa dalam penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) untuk menjelajahi pemaknaan subjek terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya (Smith, Flower & Larkin, 2009).

#### **2.2 Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu awal bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 di Obyek wisata di Desa Bira. Untuk memperkenalkan destinasi yang ada di Desa Bira.

#### **2.3 Deskripsi Fokus Penelitian**

*Tourism Governance* membahas tentang pengkoordinasian dalam pengelolaan pariwisata berupa peran spesifik yang disinergikan dalam bentuk kelembagaan yang terdiri dari gabungan pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Penelitian ini berfokus pada 4 dimensi kelembagaan yang dapat menguraikan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Desa Bira, dan peran

pemerintah daerah, stakeholder pariwisata hingga komunitas lokal menjadi pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada 10 prinsip.

Adapun deskripsi penelitian ini mengacu pada:

1. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan dan kontribusi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, yang dapat diukur dengan indikator seperti keikutsertaan dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pengelolaan destinasi, dan keterlibatan dalam inisiatif pariwisata lokal.
2. Kualitas Layanan Pariwisata: Menilai standar pelayanan dan fasilitas yang tersedia di destinasi, termasuk akomodasi, transportasi, restoran, dan atraksi wisata. Ini dapat mencakup aspek seperti kebersihan, keramahan, dan kualitas pengalaman wisatawan.
3. Infrastruktur Pariwisata: Evaluasi infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan pariwisata, termasuk jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan komunikasi. Ini meliputi juga aksesibilitas destinasi bagi wisatawan dan kemudahan transportasi lokal.
4. Pengelolaan Destinasi: Efektivitas pengelolaan destinasi pariwisata oleh pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulasi, pengawasan, dan pembangunan berkelanjutan. Ini juga mencakup upaya pelestarian lingkungan dan budaya.
5. Kemitraan Publik-Swasta: Kolaborasi antara pemerintah, industri pariwisata, dan sektor swasta lainnya untuk mengembangkan dan mempromosikan

pariwisata lokal. Ini dapat mencakup investasi, promosi bersama, dan pengembangan produk wisata.

6. Pemasaran dan Promosi: Strategi pemasaran dan promosi destinasi pariwisata kepada pasar domestik dan internasional, termasuk penggunaan media sosial, situs web, dan kampanye promosi. Evaluasi efektivitas strategi ini dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
7. Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Dampak pengembangan pariwisata terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pendapatan tambahan, dan pelestarian budaya lokal
8. Kualitas Pengalaman Wisatawan: Pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan selama mengunjungi destinasi, termasuk kepuasan, keamanan, kebersihan, dan nilai yang diperoleh dari perjalanan mereka.
9. Keberlanjutan Lingkungan: Upaya untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya destinasi pariwisata, termasuk pengelolaan limbah, konservasi alam, dan penggunaan energi yang berkelanjutan.
10. Keterjangkauan Pariwisata: Ketersediaan paket wisata yang terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan inisiatif pariwisata ramah keluarga.

#### **2.4 Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informan langsung dari instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Maros seperti; Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Adapun data primer yang didapatkan berupa hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan.

2. Data sekunder adalah data-data yang di dapat langsung dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya dan sampai dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari wawancara langsung dengan pegawai Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba dan Kantor Desar Bira.

## 2.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang menguasai permasalahan yang diteliti, serta terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang dapat menjawab masalah pokok penelitian yang dibahas. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Informan Penelitian**

No.	Inisial	Pekerjaan	Keterangan
1.	AM	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	1
2.	MA	Kepala Desa Bira	1
3.	OP	Pengunjung	3
4.	WA		
	KH		
5.	FG	Masyarakat/Pedagang Kaki lima	5
	IN		
	DF		
	BF		
	MN		
	SN		
6.	RA	Swasta/Investor	3

	PF		
	VS		

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau melihat secara langsung bagaimana Tourism Governance Berbasis masyarakat di Desa Bira.

### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kelembagaan di Kabupaten Maros, dan wawancara yang dilakukan didukung dengan pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Mempermudah penelitian, data sekunder diperoleh dari representasi studi pustaka (buku-buku) atau data yang telah tersedia dari instansi terkait dan bahan yang mendukung penelitian serta catatan lapangan penelitian. Diharapkan data ini dapat melengkapi data primer yang didapat dilapangan.

## 2.7 Teknik Pengabsahan Data

Validitasi data sangat mendukung akhir penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain

serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut William dalam Sugiyono (2012) triangulasi dalam uji kredibilitas ini dapat berarti suatu pengecekan data dari berbagai sumber yang ada dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat beberapa triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dalam mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas dalam mengecek data dengan sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.
3. Waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara diwaktu pagi hari pada saat narasumber yang akan diwawancarai masih segar, belum ada masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah kebenaran data dari manusia itu sendiri. Untuk mengecek kebenaran data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sangat dibutuhkan dalam upaya pemeriksaan kebenaran data guna kesempurnaan, validitas data, dan originalitas sumber-sumber data. Selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, triangulasi ini juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi menurut Moleong (2007) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.

Triangulasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan terhadap subjek dengan data hasil wawancara terhadap subjek itu sendiri.
2. Membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan apa yang dikatakan oleh beberapa sumber data diluar subjek seperti ketua adat, petua adat, suami dan orang tua.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang atau dalam hal ini masyarakat, tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu oleh subjek.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif subjek dengan berbagai pendapat dan pandangan dari beberapa sumber data diluar subjek seperti ketua adat, petua adat, suami dan orang tua.
5. Serta membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan, seperti: kitab adat, karya tulis pada beberapa rumpun batu, dan literatur lainnya dalam bentuk jurnal, buku, majalah budaya dan sebagainya.

## **2.8 Teknik Analisis Data**

1. Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen yaitu sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data tanpa mengetahui

teknik dalam pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti data dilakukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informan yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Model analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik Fenomenologi yaitu *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) (Eatough & Smith, 2017). Proses analisis data dalam pendekatan IPA menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian yang aktif untuk memahami dunia pengalaman subjek melalui proses interpretasi. Pendekatan IPA melibatkan dua proses interpretasi (double hermeneutic) (Smith, Flower & Larkin, 2009). Berangkat dari konsep tersebut, maka adapun langkah-langkah teknik analisis data, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membaca transkrip berulang-ulang

- b. Pencatatan awal (initial noting)
- c. Mengembangkan tema yang muncul (emergent themes)
- d. Mengembangkan tema super-ordinat
- e. Beralih ke transkrip subjek berikutnya
- f. Menemukan pola antar subjek
- g. Mendeskripsikan tema induk menjadi tulisan psikologis individu